

**STRATEGI KOMUNIKASI BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DESA NULLE KECAMATAN AMANUBAN BARAT
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Edevidis Dacosta Berek^{1*}, Stefanus Bekun², Agustinus Longa Tiza³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Timor, Kefamenanu, Indonesia

Email: edevidisdacosta21@gmail.com^{1*}, stefanusbekun@gmail.com²,
aguslongatiza@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori *AIDDA (Attention, Interest, Desire, Decision, Action)*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap program BPJS masih rendah karena kurangnya sosialisasi langsung. Minat masyarakat mulai tumbuh setelah mengetahui manfaat program. Keinginan untuk bergabung muncul ketika masyarakat memahami manfaat konkret, namun sebagian masih ragu karena kendala ekonomi dan kurangnya informasi teknis. Keputusan untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan masih terbatas pada kelompok tertentu khususnya pekerja informal. Tindakan masyarakat untuk menjadi peserta menunjukkan adanya peningkatan, namun belum optimal. Selain itu ditemukan hambatan dalam pencairan klaim, terutama bagi peserta yang bekerja diluar daerah, karena proses hanya dapat dilakukan di tingkat provinsi. Kesimpulannya, strategi komunikasi BPJS Ketenagakerjaan telah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, tetapi belum optimal dan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dalam sosialisasi maupun pelayanan.

Kata Kunci: Strategi, Komunikasi, BPJS Ketenagakerjaan, Partisipasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the communication strategy of the Social Security Administration Agency (BPJS) Employment in increasing community participation in Nulle Village, West

Article History

Received: September 2025

Reviewed: September 2025

Published: September 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Amanuban District, South Central Timor Regency. This research uses a qualitative descriptive method with the AIDDA (Attention, Interest, Desire, Decision, Action) theory approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that community attention to the BPJS program is still low due to the lack of direct socialization. Community interest began to grow after learning about the benefits of the program. The desire to join arose when the community understood the concrete benefits, but some were still hesitant due to economic constraints and lack of technical information. The decision to register for BPJS Employment is still limited to certain groups, especially informal workers. Community action to become participants shows an increase, but it is not yet optimal. In addition, obstacles were found in claim disbursement, especially for participants working outside the region, because the process can only be carried out at the provincial level. In conclusion, the communication strategy of BPJS Employment has encouraged increased community participation, but it is not yet optimal and still faces various obstacles, both in socialization and service.

Keywords: *Strategy, Communication, BPJS Employment, Participation.*

PENDAHULUAN

Jaminan sosial sangatlah penting dalam suatu negara karena untuk meningkatkan kualitas hidup warga negaranya. Jaminan sosial merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” (Fauzia, 2021:139). Selain itu, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Irawan, 2022:151).

Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. BPJS terbagi menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dan BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dari risiko sosial ekonomi. BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat jenis program jaminan sosial bagi tenaga kerja yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) (Hanafri, 2018:93).

Apabila terjadi resiko sosial terhadap pekerja baik itu kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun pensiun maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat kepada peserta dalam bentuk pelayanan maupun uang tunai. Manfaat pelayanan yang dimaksud adalah apabila terjadi kecelakaan kerja, maka peserta dapat langsung dibawah ke fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan baik klinik maupun rumah sakit tanpa mengeluarkan biaya dengan menunjukan kartu BPJS Ketenagakerjaan apabila pemberi kerja (Perusahaan) tertip membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila tidak terdapat fasilitas Kesehatan yang bekerja sama, maka pekerja tetap mendapatkan manfaat JKK tersebut. Sedangkan manfaat uang tunai akan didapatkan oleh pekerja maupun ahli warisnya apabila terjadi resiko meninggal dan hari tua atau pensiun. Perbedaan antara jaminan hari tua dan pensiun terletak pada manfaat yang akan diterima oleh pekerja atau ahli warisnya. Manfaat Jaminan Hari Tua diterima sekaligus memenuhi ketentuan pengambilan yakni usia pensiun (56), meninggal dunia, cacat total tetap, atau berhenti bekerja dan tidak bekerja lagi, sementara untuk manfaat jaminan pensiun akan diterima secara berkala setiap bulan kepada pekerja atau ahli warisnya apabila pekerja memasuki usia pensiun (56) dengan minimal iuran 15 tahun, meninggal dunia (dengan iuran minimal dibayar 12 bulan), syarat tersebut belum terpenuhi, maka pekerja atau ahli warisnya akan mendapatkan manfaat akumulasi iuran tambahan dengan mengembangkannya (Hanafri,2018:94).

Namun, meskipun program ini memiliki banyak manfaat, tingkat partisipasi masyarakat dalam BPJS Ketenagakerjaan masih tergolong rendah, terutama di sektor pekerja informal dan daerah pedesaan (Aseandi, 2024:1662). Karena keterbatasan informasi dan komunikasi sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan juga umumnya belum menjangkau daerah-daerah terpencil. Inilah yang menjadi sebab utama rendahnya kepesertaan jaminan sosial. Selain itu, rendahnya kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di sebabkan karena BPJS Ketenagakerjaan belum menjadi bagian penting dari kebutuhan pekerja. Masyarakat menganggap bahwa partisipasi terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak begitu diperlukan (Purba, 2020:162).

Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan telah menggunakan beberapa Strategi komunikasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat meliputi sosialisasi langsung melalui seminar dan penyuluhan, penggunaan media sosial, kerja sama dengan pemerintah daerah, serta penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik. Namun, strategi komunikasi yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum berjalan optimal (Aseandi, 2024:1663).

Berdasarkan data nasional, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024 adalah sebanyak 38,8 juta orang, yang terdiri dari penerima upah sebanyak 25,7 juta orang, lalu bukan penerima upah 7,5 juta orang, dan jasa konstruksi 5,5 juta orang (BPJS Ketenagakerjaan, 2024). sedangkan jumlah pekerja di Indonesia mencapai 142,18 juta orang (BPS Indonesia, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerja yang belum terdaftar dalam program ini. Salah satu faktor utama rendahnya kepesertaan adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan akibat strategi komunikasi yang belum optimal.

Seperti halnya di sampaikan oleh Emanuel Melkiades Laka Lena dalam sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada 200 warga di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Peserta BPJS Ketenagakerjaan saat ini hanya 30 juta lebih, sedangkan peserta BPJS Kesehatan sekitar 230 juta. Dengan demikian penyerapan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan belum terserap

secara optimal. Tidak hanya itu masalah lainnya adalah banyak masyarakat yang belum mengetahui program dari BPJS Ketenagakerjaan (Timex Kupang, 2022).

Pada bulan Desember 2024, BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur memberikan penghargaan kepada tiga desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan yakni Desa Bena (Kecamatan Amanuban Selatan), Desa Besle'u (Kecamatan Fautmolo), dan Desa Lilo (Kecamatan Amanatun Utara). Ketiga desa ini dinilai berhasil menunjukkan komitmen dalam mendorong kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi perangkat desa dan masyarakat rentan seperti petani, dan pekerja informal. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka mendukung program "Desa Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" yang diinisiasi untuk memperluas cakupan perlindungan sosial di wilayah pedesaan. Namun, keberhasilan ini belum mencerminkan kondisi seluruh desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Masih banyak desa lain, termasuk Desa Nulle di Kecamatan Amanuban Barat, yang belum tersentuh secara optimal oleh program sosialisasi dan edukasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan masih belum menjangkau semua kelompok masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Akibatnya, pemahaman masyarakat tentang manfaat dan pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan masih rendah, dan partisipasi aktif pun belum maksimal. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas jangkauan strategi komunikasinya, agar dapat menciptakan kesetaraan akses informasi dan perlindungan bagi seluruh masyarakat desa (Soepost, 2024).

Kondisi ini juga terjadi di Desa Nulle, Kecaamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Timor Tengah Selatan, jumlah peserta aktif di Desa Nulle dari tahun 2021 hingga 2024 mengalami peningkatan, tetapi masih relatif rendah dibandingkan jumlah pekerja yang ada di desa tersebut sebanyak 2.210 yang terdiri dari 1.110 orang laki-laki dan 1.100 orang perempuan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 248 peserta aktif, meningkat menjadi 320 peserta aktif pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Desa Nulle Kabupaten TTS Menurut Status Keaktifan 2021-2024

Tahun	Kepesertaan Aktif		Jumlah
	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	
2021	8	240	248
2022	9	260	269
2023	10	287	297
2024	10	310	320

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi oleh pekerja bukan penerima upah, sedangkan jumlah penerima upah yang menjadi peserta aktif sangat sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada banyak pekerja yang belum terdaftar. Jika menggunakan teori *AIDDA* (*Attention, Interest, Desire, Decision, Action*) yang dikembangkan oleh Wilbur Schramm, strategi komunikasi yang efektif harus mampu menarik perhatian (*attention*), membangkitkan minat (*interest*), menciptakan keinginan (*desire*),

membantu pengambilan keputusan (*decision*), dan mendorong tindakan (*action*) (Effendy, 2007:49).

Oleh karena itu, memperhatikan beragam permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas, menarik bagi penulis untuk melakukan kajian mendalam melalui penelitian dengan judul: “Strategi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini lebih menekankan pada pengembangan teori yang ada melalui penelitian di lapangan yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah informan dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dari berbagai sumber adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahapan yaitu Mereduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Drawing conclusions*).

HASIL PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Nulle merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan penuturan dari tokoh adat dan kepala desa setempat, wilayah Desa Nulle pertama kali dihuni oleh kelompok yang dikenal dengan nama Nijabi. Pada masa sebelum keberadaan Kerajaan Amanuban, seorang tokoh bernama Selan diutus oleh Liurai (penguasa lokal) sebagai pahlawan untuk mengusir kelompok Nijabi dari wilayah kekuasaan tersebut.

Perjuangan Selan dalam mengusir kelompok Nijabi bukanlah perkara mudah, melainkan membutuhkan pengorbanan besar dari rakyat dan penguasa kala itu. Dalam bahasa asli setempat, pengorbanan besar ini dikenal dengan istilah “Mnulle-Mnulle” atau “Mnoe Am”, yang berarti “hancur luluh.” Seiring berjalannya waktu, kata Mnulle mengalami penyederhanaan pengucapan dan perubahan bentuk bahasa, hingga akhirnya menjadi “Nulle”, yang kini menjadi nama resmi desa tersebut.

Secara historis, wilayah Amanuban, termasuk Desa Nulle, dahulu berada di bawah kekuasaan Raja Nuban (Banamtuan) yang berpusat di Tumbes. Sebelum pemerintahan kolonial Belanda masuk ke wilayah Timor, kekuasaan di daerah ini kemudian diserahkan kepada Raja Nope, yang saat itu dipimpin oleh PA.E. Nope atau dikenal juga dengan nama Usi Pina. Beliau adalah ayah dari Kusa Nope, yang dikenal sebagai Bupati pertama Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial yang berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja disektor formal.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan hasil transformasi dari Jamsostek. Sebelum menjadi BPJS Ketenagakerjaan, PT Jamsostek mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 dan UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP)

No.48/1952 dan PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) untuk mengikuti program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) yaitu Perum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK).

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), dan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU Nomor 24 Tahun 2011. Tahun 2011, ditetapkanlah UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT. Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap diperaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT, dengan penambahan Jaminan Pensiun (JP) yang telah beroperasi pada tanggal 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi diseluruh bagian pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari transformasi PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, pemerintah pusat mulai memperluas jangkauan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke daerah-daerah, termasuk Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan di wilayah ini merupakan bagian dari komitmen untuk memberikan perlindungan kerja kepada masyarakat, khususnya pekerja sektor informal dan rentan.

Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, BPJS Ketenagakerjaan beroperasi di bawah naungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten TTS. Kantor pelayanan ini berlokasi di Jl. Hatta No.18, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota SoE. Melalui keberadaannya di bawah instansi pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan mulai aktif melayani masyarakat dengan memperkenalkan dan menyosialisasikan program-program jaminan sosial seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten TTS menjadi langkah awal dalam menjembatani masyarakat dengan sistem perlindungan sosial nasional. Keberadaan lembaga ini juga mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin hak-hak dasar para pekerja dan menciptakan rasa aman dalam aktivitas kerja sehari-hari.

1) Visi dan Misi

Visi

Menjadi BPJS berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan.

Misi

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi:

1. Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga
2. Pengusaha : Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas
3. Negara : Berperan serta dalam pembangunan

2) Filosofi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi risiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan di hari tua maupun keluarganya apabila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain. Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.

3) Motto BPJS Ketenagakerjaan

“Menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja”.

4) Nilai-Nilai BPJS Ketenagakerjaan

1. Iman : Taqwa, berpikir positif, tanggung jawab, pelayanan tulus ikhlas
2. Profesional: Berprestasi, bermental unggul, proaktif, dan bersikap positif terhadap perubahan dan pembaharuan
3. Teladan : Berpandangan jauh ke depan, penghargaan dan pembimbingan (*reward & encouragement*)

4. **Integritas** : Berani, komitmen, keterbukaan
5. **Kerja Sama: Kebersamaan**, menghargai pendapat, menghargai orang lain.
- 5) **Etika Kerja BPJS Ketenagakerjaan**
 1. *Teamwork* : Memiliki kemampuan
 2. dalam membangun kerjasama dengan orang lain atau dengan kelompok untuk mencapai tujuan perusahaan.
 3. *Open Mind*: Memiliki kemampuan untuk membuka pikiran dan menerima gagasan-gagasan baru yang lebih baik.
 4. *Passion* : Bersemangat dan antusias dalam melaksanakan pekerjaan.
 5. *Action* : Segera melaksanakan rencana/pekerjaan/tugas yang telah disepakati dan ditetapkan bersama.
 6. *Sense* : Rasa memiliki, kepedulian, ikut bertanggung jawab dan memiliki inisiatif yang tinggi untuk memecahkan masalah perusahaan.
7. **Logo BPJS Ketenagakerjaan**



Gambar 1. Logo BPJS Ketenagakerjaan

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan cabang TTS, 2025

1. **Arti warna lambang BPJS Ketenagakerjaan**
 - a. **Hijau**
 - (1) Warna hijau melambangkan kesejahteraan
 - (2) Warna hijau diharapkan dapat mempresentasikan nilai-nilai pertumbuhan, harmoni, kesegaran, stabilitas dan keamanan.
 - b. **Putih**
 - (1) Warna putih melambangkan integritas
 - (2) Warna putih diharapkan dapat mempresentasikan kemurnian, kebersihan dan kesempurnaan sebagai simbol kebaikan.
 - c. **Kuning**
 - (1) Warna kuning melambangkan optimis
 - (2) Warna kuning diharapkan dapat mempresentasikan optimis, pencerahan dan kebahagiaan serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik.
 - d. **Biru**
 - (1) Warna biru melambangkan keberlanjutan
 - (2) Warna biru diharapkan dapat mempresentasikan kepercayaan, kesetiaan, kebijaksanaan, kepercayaan diri, keahlian dan ketahanan jangka panjang.
2. **Arti bentuk lambang**

Selain dari sisi warna, perbedaan lain pada logo BPJS Ketenagakerjaan adalah pada tipologi huruf “J” yang membelah lingkaran dan dibuat makin membesar dari bawah ke atas. Ini melambangkan cita-cita BPJS Ketenagakerjaan yang terus bergerak naik dan semakin memberikan banyak manfaat bagi pekerja.

Selain itu, huruf “J” yang dibuat melebihi diameter lingkaran melambangkan sebagai puncak pencapaian yaitu *universal coverage* bagi kesejahteraan seluruh tenaga kerja di Indonesia.

8. Aparat Desa yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Jumlah aparat desa yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tercatat sebanyak 10 orang. Hal ini menunjukkan adanya partisipasi dari pemerintah desa dalam program perlindungan ketenagakerjaan. Berikut adalah daftar aparat Desa Nulle yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan:

Tabel 2. Daftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Desa Nulle Tahun 2024

No	Nama	Jabatan
1	Mehelpiades Selan	Kepala Desa
2	Yoksan H.R. Selan	Sekertaris Desa
3	Yopi A. Selan	Kasi Pemerintahan
4	Jose T. Dosantos	Kasi Pembangunan
5	Welem A.S. Selan	Kaur Keuangan
6	Adrianus Tse	Kaur Umum
7	L. Selan	Kepala Dusun A
8	Benyamin Selan	Kepala Dusun B
9	Jehr Selan	Kepala Dusun C
10	Ayub Faot	Kepala Dusun D

Sumber: Data Pemerintah Desa Nulle, 2024

Berdasarkan Tabel 2. di atas, tercatat sebanyak 10 orang aparat Desa Nulle yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024. Mereka terdiri dari unsur pimpinan desa, yaitu Kepala Desa dan Sekertaris Desa, serta kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun dari masing-masing wilayah dusun A hingga D.

Keikutsertaan aparat desa dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dari pemerintah desa dalam memberikan perlindungan sosial bagi para penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Hal ini juga mencerminkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai contoh atau role model bagi masyarakat dalam mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

9. Jumlah Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)

Tabel 3. Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten TTS Menurut Status Keaktifan 2021-2024

Tahun	Kepesertaan Aktif		Jumlah
	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	
2021	21.076	3.601	24.677
2022	25.803	4.472	30.275
2023	26.351	7.300	33651
2024	28.848	8.018	36.866

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, yakni dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, jumlah peserta aktif tercatat sebanyak 24.677 orang, yang terdiri dari 21.076 peserta kategori Penerima Upah dan 3.601 peserta kategori Bukan Penerima Upah.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan saat adanya sosialisasi pada tahun 2022 menjadi 30.275 peserta, kemudian bertambah menjadi 33.651 peserta pada tahun 2023, dan terus meningkat hingga mencapai 36.866 peserta pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan serta efektivitas strategi perluasan kepesertaan yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Lebih lanjut, peningkatan jumlah peserta tidak hanya terjadi pada kategori Penerima Upah, tetapi juga terlihat cukup signifikan pada kategori Bukan Penerima Upah, yakni dari 3.601 peserta pada tahun 2021 menjadi 8.018 peserta pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan semakin mampu menjangkau pekerja sektor informal seperti petani, tukang ojek, pedagang, dan pelaku usaha mikro yang sebelumnya belum tersentuh program jaminan sosial tenaga kerja. Dengan demikian, data ini menjadi indikator penting dalam melihat efektivitas implementasi program sekaligus tantangan strategis ke depan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah pedesaan seperti Desa Nulle.

Sumber Daya Alam Desa

Sumber daya alam Desa Nulle akan digambarkan sesuai dengan keadaan desa, letak desa serta penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu, untuk lebih detail dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Batas Wilayah Desa

Desa Nulle merupakan salah satu desa di Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki luas wilayah sebesar 23,1 km². Secara geografis, Desa Nulle berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Tabel 4. Batas Wilayah Desa Nulle 2024

No	Batas	Desa/Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa Oenlasi / Kobekamusa
2	Sebelah Selatan	Desa Oebaki / Noebeba - Kecamatan Kuantnana
3	Sebelah Timur	Desa Tublopo - Kecamatan Amanuban Barat
4	Sebelah Barat	Desa Melalete dan Pusu - Kecamatan Amanuban Barat

Sumber: Profil Desa Nulle, 2024

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas, dapat diketahui bahwa batas wilayah Desa Nulle: sebelah utara berbatasan dengan Desa Oenlasi/Kobekamusa; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Oebaki/Noebeba yang berada di Kecamatan Kuantnana; sebelah timur berbatasan dengan Desa Tublopo di Kecamatan Amanuban Barat; dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Melalete dan Desa Pusu yang juga berada di Kecamatan Amanuban Barat.

2) Iklim

Keadaan iklim Desa Nulle, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Nusa Tenggara Timur, terdiri dari dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Hal ini memberikan pengaruh langsung terhadap pola tanam masyarakat Desa Nulle di Kecamatan Amanuban Barat. Suhu rata-rata berkisar pada 23-28°C dengan ketinggian rata-rata wilayah mencapai 800 meter di atas permukaan laut (Mdpl).

3) Topografi

Secara topografis, wilayah Desa Nulle berbentuk lereng gunung dan lembah. Kondisi ini berpengaruh besar terhadap pemanfaatan lahan oleh masyarakat desa. Lahan-lahan yang berada di lereng dimanfaatkan untuk menanam tanaman buah seperti pisang, asam, mangga, dan alpukat, yang sesuai dengan kontur tanah miring serta curah hujan sedang. Sementara itu, wilayah lembah yang memiliki tanah lebih subur digunakan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan seperti bawang merah, jagung, dan kacang-kacangan. Topografi yang beragam ini juga turut memengaruhi pola tanam masyarakat di Desa Nulle.

Sumber Daya Manusia

1) Jumlah Penduduk Desa Nulle

Desa Nulle terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun A, Dusun B, Dusun C, dan Dusun D, dengan jumlah penduduk sebanyak 4.516 jiwa atau 1.232 Kepala Keluarga (KK). Perincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Nulle Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	2.238
Perempuan	2.278
Total Jumlah Penduduk	4.516

Sumber: Olahan Profil Desa Nulle, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 5. di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki di Desa Nulle sebanyak 2.238 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.278 jiwa. Jumlah total penduduk adalah 4.516 jiwa yang tersebar di 1.232 Kepala Keluarga (KK). Dari total jumlah KK tersebut, sebanyak 570 KK dikategorikan sebagai keluarga miskin.

2) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Mata pencarian penduduk Desa Nulle sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencarian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Mata Pencarian Penduduk di Desa Nulle Tahun 2024

Jenis Mata Pencarian	Jumlah
Petani	-
PNS	105
TNI	4
Polri	2
Swasta	1.121

Sumber: Olahan Profil Desa Nulle, 2024

Berdasarkan Tabel 6. di atas, mayoritas masyarakat Desa Nulle bekerja sebagai petani. Selain itu, terdapat juga penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 105 orang, anggota TNI sebanyak 4 orang, anggota Polri 2 orang, serta bekerja di sektor swasta sebanyak 1.121 orang.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, maka penulis telah mendapatkan uraian data perihal menunjang Strategi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal ini tentu perlu relevansi atau kesesuaian data dan turunan teori yang telah di jelaskan Wilbur Schramm dalam Effendy (2007:49) yang dijelaskan dan ditetapkan dalam kerangka pikir pada skripsi yakni:

- 1) *Attention* (Perhatian)
- 2) *Interest* (Minat)
- 3) *Desire* (Keinginan)
- 4) *Decision* (Keputusan)
- 5) *Action* (Tindakan)

Kelima indikator ini setidaknya menjadi alat ukur dalam melacak sinergitas uraian data wawancara dan observasi terkait tawaran dalam rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kompleksitas kelima indikator yang dijelaskan dalam Effendy (2007:49) cukup memberikan jalan dalam mempertimbangkan ukuran menunjang Strategi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan

Attention (Perhatian)

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator perhatian, dapat dilihat bahwa perhatian masyarakat Desa Nulle terhadap program BPJS Ketenagakerjaan belum terbentuk secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara langsung oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat. Upaya penyampaian informasi masih terbatas pada lingkup pemerintah desa melalui kunjungan satu kali, dan belum menjangkau masyarakat secara luas.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, diketahui bahwa di kantor BPJS Ketenagakerjaan memang tersedia media informasi seperti banner dan TV yang memutar informasi seputar program-program BPJS Ketenagakerjaan. Namun, fasilitas informasi tersebut hanya dapat diakses oleh masyarakat yang datang langsung ke kantor BPJS. Sementara itu, di kantor desa Nulle tidak tersedia fasilitas atau media informasi apapun terkait BPJS Ketenagakerjaan. Tidak terdapat poster, selebaran, maupun papan informasi yang dapat menjelaskan program ini kepada masyarakat desa. Selain itu, penulis mengamati bahwa masyarakat Desa Nulle belum pernah melihat adanya petugas BPJS Ketenagakerjaan datang langsung untuk melakukan sosialisasi di desa. Hal ini mengakibatkan pemahaman masyarakat sangat terbatas. Mereka lebih mengenal BPJS Kesehatan dibandingkan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan bisa mencairkan uang, tanpa memahami secara menyeluruh manfaat, prosedur, dan kewajiban dalam program tersebut.

Penulis juga mengamati bahwa sebagian besar masyarakat yang datang ke kantor BPJS untuk mendaftar atau mengurus dokumen, melakukannya karena kebutuhan kerja ke luar daerah, bukan karena inisiatif pribadi atau pemahaman yang kuat akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam teori *AIDDA* menurut Wilbur Schramm dalam Effendy (2007), perhatian merupakan tahap awal komunikasi di mana audiens ditarik untuk mulai mengenali pesan yang disampaikan. Strategi komunikasi yang efektif seharusnya mampu menimbulkan kesadaran dan ketertarikan awal melalui pendekatan yang sesuai dengan karakteristik sasaran. Namun dalam praktiknya, pendekatan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Desa Nulle belum optimal karena belum ada penggunaan media komunikasi langsung atau kegiatan yang mampu menarik perhatian masyarakat secara luas di tingkat desa. Menurut teori strategi komunikasi dari Onong Uchjana Effendy (2009), strategi komunikasi harus mencakup perencanaan yang sistematis mengenai siapa komunikatornya, pesan apa yang disampaikan, melalui media apa, kepada siapa, dan dalam kondisi seperti apa. Dalam konteks ini, kegagalan menjangkau khalayak luas di desa menunjukkan bahwa strategi komunikasi belum berjalan secara menyeluruh. Minimnya komunikasi langsung dari BPJS membuat perhatian masyarakat hanya terbentuk melalui informasi tidak resmi, seperti cerita dari teman, pengalaman pribadi saat bekerja di luar daerah, atau informasi lisan dari aparat desa yang terbatas.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perhatian masyarakat Desa Nulle terhadap BPJS Ketenagakerjaan masih rendah akibat kurangnya akses terhadap media informasi resmi dan belum adanya kegiatan komunikasi langsung secara masif yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan di tingkat desa.

Interest (Minat)

Pada tahap minat, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap program BPJS Ketenagakerjaan mulai terbentuk, meskipun masih terbatas pada kelompok tertentu. Minat ini umumnya muncul setelah masyarakat mengetahui manfaat dari program secara langsung, seperti perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua, baik melalui penjelasan dari pihak BPJS, perangkat desa, maupun pengalaman pribadi atau orang terdekat.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa minat masyarakat terhadap program ini belum muncul secara aktif dari diri sendiri, melainkan lebih banyak didorong oleh keharusan dari perusahaan atau pengalaman orang lain. Tidak ada masyarakat yang secara khusus mencari tahu lebih lanjut tentang program BPJS Ketenagakerjaan kecuali ketika mereka diwajibkan untuk mengurusnya demi keperluan pekerjaan, terutama saat hendak bekerja ke luar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa minat yang terbentuk belum bersifat murni dari kesadaran informasi, tetapi lebih karena faktor eksternal. Minat masyarakat lebih banyak dibangun melalui jalur tidak resmi seperti cerita dari teman kerja, pengalaman melihat teman yang berhasil klaim manfaat, atau instruksi langsung dari perusahaan untuk mendaftar. Sementara itu, masyarakat yang belum tergabung sebagai peserta, seperti tukang ojek dan satpam, belum menunjukkan minat yang kuat karena mereka merasa belum mendapatkan penjelasan atau pemahaman yang memadai. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya perbandingan dengan BPJS Kesehatan yang dianggap lebih menarik dan lebih dipahami, karena sebelumnya sudah pernah dilakukan sosialisasi langsung oleh pihak terkait di Desa Nulle.

Menurut teori *AIDDA*, tahap minat muncul setelah perhatian terbangun. Di tahap ini, audiens mulai menunjukkan rasa ingin tahu dan ketertarikan terhadap pesan yang disampaikan. Minat akan muncul apabila informasi yang diterima dirasa relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi nyata yang mereka hadapi. Dalam hal ini, masyarakat Desa Nulle yang bekerja di sektor berisiko seperti buruh, petani, supir, atau satpam menganggap manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan cukup relevan dengan kondisi pekerjaan mereka. Namun demikian, minat masyarakat sebagian besar masih tumbuh dari penjelasan informal, seperti cerita dari teman atau pengalaman kerja di luar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dijalankan belum sepenuhnya mampu membangkitkan minat melalui jalur komunikasi yang terstruktur dan langsung. Peran perusahaan, tempat kerja, dan jaringan sosial menjadi lebih dominan dalam membentuk persepsi masyarakat dibandingkan peran lembaga penyelenggara program. Secara strategis, teori komunikasi dari Acep Aripudin dalam (Tajuddin, 2015) menekankan pentingnya menyusun pesan yang tidak hanya informatif tetapi juga persuasif dan sesuai dengan kondisi audiens. Dalam konteks ini, kurangnya pendekatan yang menyentuh langsung masyarakat terutama mereka yang bekerja secara informal menjadi kendala dalam memperkuat minat. Pemerintah desa pun belum sepenuhnya mampu menyampaikan informasi mendalam karena keterbatasan pemahaman dan belum adanya pelatihan dari pihak BPJS.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa minat terhadap program BPJS Ketenagakerjaan mulai terbentuk, namun masih bergantung pada inisiatif individu atau pihak luar, bukan hasil dari strategi komunikasi institusional. Agar minat masyarakat meningkat secara merata, perlu adanya kegiatan komunikasi yang terarah dan menyeluruh, terutama kepada kelompok masyarakat yang berisiko namun belum terlayani secara informasi.

Desire (Keinginan)

Berdasarkan hasil penelitian, keinginan masyarakat untuk bergabung dalam program BPJS Ketenagakerjaan mulai muncul terutama setelah mereka memahami manfaat program secara lebih konkret. Keinginan ini terlihat lebih kuat pada kelompok yang telah mendapatkan informasi yang jelas atau menyaksikan langsung manfaat program yang diterima oleh orang terdekat, seperti perlindungan saat terjadi kecelakaan kerja dan pencairan jaminan hari tua saat berhenti bekerja.

Dalam kerangka *AIDDA*, *desire* merupakan tahap lanjutan dari minat, yaitu saat seseorang tidak hanya tertarik tetapi mulai memiliki dorongan untuk bertindak atau terlibat secara langsung. Menurut Effendy dalam (Mongkau, 2017), keinginan akan muncul ketika pesan komunikasi berhasil menyentuh kebutuhan emosional dan praktis dari audiens. Dalam konteks ini, kebutuhan akan perlindungan kerja, jaminan masa depan, dan keamanan finansial menjadi faktor pemicu tumbuhnya keinginan dari masyarakat. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan bahwa tidak ada masyarakat yang secara mandiri menyatakan keinginan untuk mendaftar sebagai peserta tanpa dorongan dari perusahaan atau pihak luar. Keinginan mereka muncul umumnya karena kebutuhan pekerjaan, baik karena diwajibkan oleh tempat kerja atau melihat teman yang bisa mencairkan uang jaminan. Aparat desa dan peserta BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan keinginan yang lebih kuat karena mereka menyadari pentingnya perlindungan kerja, terutama karena pekerjaan mereka memiliki risiko yang tinggi. Mereka merasa bahwa program ini memberikan rasa aman dalam menghadapi kemungkinan kecelakaan kerja.

Namun demikian, keinginan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kesiapan bertindak, khususnya di kalangan non-peserta. Dari hasil observasi, diketahui bahwa banyak masyarakat non-peserta menyatakan ingin ikut jika ada sosialisasi atau pendampingan langsung, tetapi mereka masih ragu karena tidak tahu cara mendaftar, belum jelas besaran iuran, serta khawatir tidak mampu membayar iuran secara rutin. Sebagian masyarakat juga hanya mengenal BPJS Ketenagakerjaan sebatas “bisa cair uang” tanpa memahami keseluruhan manfaat dan prosedur program ini. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan yang ada belum mampu dikonversi menjadi tindakan nyata akibat terbatasnya strategi komunikasi yang memberikan pendampingan dan edukasi teknis secara langsung. Kurangnya pendekatan langsung ke masyarakat menyebabkan keinginan mereka untuk bergabung hanya terbentuk secara pasif dan belum disertai dengan motivasi kuat untuk mendaftar secara mandiri. Secara teoritis, Effendy dalam (Mongkau, 2017) menegaskan bahwa strategi komunikasi yang efektif harus tidak hanya informatif tetapi juga mampu mendorong perubahan sikap dan membentuk intensi bertindak. Dalam hal ini, BPJS Ketenagakerjaan perlu memperkuat pendekatannya dengan mengedepankan komunikasi yang menyentuh aspek kebutuhan dan ketakutan masyarakat, serta memberi solusi konkret terhadap hambatan yang mereka rasakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keinginan masyarakat Desa Nulle untuk bergabung dalam program BPJS Ketenagakerjaan telah mulai terbentuk, terutama dari pengalaman langsung dan relevansi manfaat program. Namun, tanpa dukungan komunikasi lanjutan yang mampu menjawab keraguan teknis dan administratif, keinginan ini akan cenderung terhambat dan tidak berkembang menjadi tindakan nyata.

Decision (Keputusan)

Pada tahap keputusan, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jelas antara kelompok yang telah menjadi peserta dan kelompok yang belum. Aparat desa dan sebagian masyarakat yang telah menerima informasi secara langsung, baik dari pihak BPJS maupun dari pengalaman kerja, akhirnya memutuskan untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Keputusan tersebut umumnya diambil karena adanya dukungan informasi yang cukup, pendampingan dari petugas, serta pemahaman manfaat yang diterima.

Dalam teori *AIDDA*, *decision* merupakan tahap di mana audiens tidak hanya menginginkan suatu hal, tetapi mulai mengambil keputusan untuk bertindak. Tahapan ini merupakan hasil dari kombinasi perhatian, minat, dan keinginan yang terakumulasi dan diyakini cukup kuat untuk mendorong individu pada titik pilihan. Menurut Schramm dalam (Effendy, 2007), agar individu mampu sampai pada tahap keputusan, diperlukan adanya dorongan yang meyakinkan dan dukungan yang memudahkan proses transisi dari sikap menjadi tindakan. Dari hasil wawancara, aparat desa yang telah diberikan informasi dan dibantu proses pendaftarannya oleh BPJS Ketenagakerjaan cenderung langsung mengambil keputusan untuk mendaftar. Hal ini menunjukkan bahwa ketika proses komunikasi didukung oleh akses layanan yang mudah, maka keputusan untuk ikut serta dalam program lebih mudah diambil. Sementara itu, peserta yang berasal dari sektor formal tidak melalui proses pengambilan keputusan yang kompleks karena mereka didaftarkan secara otomatis oleh perusahaan. Dalam hal ini, keputusan bersifat pasif dan tidak melalui pertimbangan individu yang mendalam, melainkan merupakan bagian dari sistem kerja yang mewajibkan mereka menjadi peserta.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, terdapat perbedaan yang jelas dalam proses pengambilan keputusan. Aparat desa memang datang sendiri ke kantor BPJS, tetapi tetap didampingi dan dibantu oleh petugas saat mendaftar. Hal ini menunjukkan bahwa akses

informasi dan kemudahan layanan mendorong proses keputusan. Sementara itu, masyarakat umum di Desa Nulle yang telah menjadi peserta mayoritas tidak membuat keputusan secara sadar dan mandiri, karena mereka hanya mengikuti prosedur yang diwajibkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Di sisi lain, kelompok non-peserta belum sampai pada tahap pengambilan keputusan karena sejumlah kendala, seperti ketidaktahuan prosedur, ketidakpastian mengenai biaya iuran, dan belum adanya sosialisasi resmi yang menyentuh masyarakat secara luas. Beberapa warga diketahui tahu lokasi kantor BPJS, tetapi mereka belum memahami langkah-langkah atau alur pendaftarannya secara jelas. Ini menunjukkan bahwa meskipun keinginan mungkin sudah ada, ketidaktahuan teknis menjadi penghambat utama dalam pengambilan keputusan. Dari perspektif strategi komunikasi, hal ini menegaskan pentingnya peran edukasi teknis dan pendampingan langsung dalam mempercepat proses pengambilan keputusan masyarakat. Menurut Suprpto (2011), strategi komunikasi yang baik harus mampu memfasilitasi audiens dalam melewati setiap tahapan komunikasi hingga akhirnya mengambil keputusan yang diharapkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di Desa Nulle hanya terjadi pada kelompok yang memiliki akses informasi, bantuan teknis, dan dorongan institusional. Sementara kelompok lain masih berada dalam tahap ragu karena belum adanya strategi komunikasi yang secara khusus diarahkan untuk mendampingi proses pengambilan keputusan mereka.



Gambar 2. Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Milik Masyarakat Desa Nulle

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Action (Tindakan)

Tahap tindakan merupakan tahap akhir dari proses komunikasi menurut model *AIDDA*. Pada tahap ini, audiens diharapkan melakukan respons nyata sebagai hasil dari perhatian, minat, keinginan, dan keputusan yang telah terbentuk. Dalam konteks penelitian ini, tindakan yang dimaksud adalah partisipasi aktif masyarakat Desa Nulle dalam program BPJS Ketenagakerjaan, baik dalam bentuk pendaftaran, klaim manfaat, maupun keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan nyata baru dilakukan oleh beberapa pihak, khususnya aparat desa yang telah didampingi langsung oleh pihak BPJS dan masyarakat yang telah menjadi peserta melalui perusahaan tempat mereka bekerja. Tindakan ini dilakukan karena mereka telah menerima informasi, mendapatkan kemudahan teknis dalam proses pendaftaran, serta menyadari langsung manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, beberapa peserta bahkan telah berhasil melakukan klaim manfaat seperti pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) setelah mereka berhenti bekerja. Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa sebagian peserta yang telah kembali ke Desa Nulle pernah melakukan

tindakan nyata dengan mengurus klaim ke kantor BPJS provinsi di Kupang. Sementara itu, ada juga masyarakat yang mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan, meskipun mereka bukan berasal dari Desa Nulle, melainkan dari daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan mandiri masih sangat terbatas di kalangan masyarakat Desa Nulle sendiri.

Observasi juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Nulle yang belum menjadi peserta menyatakan bersedia bertindak apabila ada kegiatan sosialisasi langsung di desa. Mereka menyampaikan kesediaan untuk hadir dan ikut mendaftar jika mendapatkan pendampingan langsung dari BPJS atau pemerintah desa. Namun sejauh ini, belum terlihat adanya tindakan proaktif dari non-peserta untuk mendaftar secara mandiri. Selain itu, belum ditemukan adanya peserta yang aktif mengajak orang lain untuk ikut serta, dan informasi yang beredar di masyarakat lebih banyak berasal dari cerita teman kerja yang berada di luar Desa Nulle. Menurut teori *AIDDA*, tahapan tindakan merupakan output dari komunikasi yang efektif, di mana pesan yang disampaikan tidak hanya dipahami, tetapi juga memotivasi audiens untuk bertindak. Dalam hal ini, efektivitas strategi komunikasi BPJS Ketenagakerjaan masih belum optimal karena belum mampu menghasilkan tindakan nyata secara merata di kalangan masyarakat Desa Nulle.

Dari sudut pandang strategi komunikasi, hal ini menunjukkan bahwa belum adanya pola komunikasi dua arah yang aktif dan partisipatif. Effendy menyebutkan bahwa strategi komunikasi yang baik harus didesain untuk tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan interaksi yang mendorong perubahan sikap dan perilaku. Dalam kasus ini, BPJS Ketenagakerjaan masih berada pada tahap penyampaian informasi awal dan belum menyentuh aspek transformasi perilaku masyarakat secara luas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan nyata masyarakat terhadap program BPJS Ketenagakerjaan di Desa Nulle masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu yang sudah terpapar langsung oleh informasi dan layanan. Untuk meningkatkan tindakan secara menyeluruh, BPJS Ketenagakerjaan perlu menyusun strategi komunikasi yang lebih aktif, inklusif, dan berbasis pada pendekatan langsung kepada masyarakat, khususnya pekerja sektor informal yang jumlahnya cukup signifikan di desa ini.



Gambar 3. Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang TTS

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian mengenai Strategi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dianalisis menggunakan teori *AIDDA* dari Wilbur Schramm, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil analisis mengenai perhatian (*attention*) dapat disimpulkan bahwa perhatian masyarakat Desa Nulle terhadap program BPJS Ketenagakerjaan masih terbatas. Hal ini disebabkan karena belum adanya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Informasi yang diterima oleh masyarakat sebagian besar hanya bersumber dari aparat desa atau pihak ketiga seperti perusahaan tempat bekerja dan cerita dari rekan kerja. Strategi komunikasi belum dijalankan secara aktif dan menyeluruh untuk membangun kesadaran awal masyarakat terhadap pentingnya program ini.
- 2) Berdasarkan hasil analisis mengenai minat (*interest*) dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat terhadap program BPJS Ketenagakerjaan mulai terbentuk, khususnya pada kelompok masyarakat yang bekerja di sektor berisiko atau telah menerima penjelasan manfaat program secara langsung. Namun, minat ini masih berkembang secara terbatas dan tidak merata karena kurangnya penyampaian informasi yang mendalam serta belum adanya pendekatan komunikasi yang intensif dari pihak BPJS.
- 3) Berdasarkan hasil analisis mengenai keinginan (*desire*) dapat disimpulkan bahwa keinginan masyarakat untuk bergabung dalam program BPJS Ketenagakerjaan mulai tumbuh setelah mengetahui manfaat nyata dari program, seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Namun, keinginan ini belum sepenuhnya dapat diwujudkan karena kurangnya pemahaman teknis dan tidak adanya pendampingan langsung dari pihak BPJS dalam proses pendaftaran dan pemenuhan syarat administrasi.
- 4) Berdasarkan hasil analisis mengenai keputusan (*decision*) dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya terjadi pada kelompok tertentu, seperti aparat desa yang telah menerima informasi secara langsung dan mendapatkan bantuan teknis dalam proses pendaftaran. Sedangkan kelompok masyarakat lainnya belum mengambil keputusan untuk bergabung karena keterbatasan informasi, ketidaktahuan alur pendaftaran, dan ketiadaan sosialisasi resmi yang dapat meyakinkan mereka untuk bergabung.
- 5) Berdasarkan hasil analisis mengenai tindakan (*action*) dapat disimpulkan bahwa tindakan nyata masyarakat untuk berpartisipasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah dan terbatas pada peserta yang terdaftar melalui perusahaan. Aparat desa yang telah mendaftar juga belum dapat mendorong masyarakat secara luas karena keterbatasan informasi dan sosialisasi. Masyarakat non-peserta menunjukkan kesiapan untuk bertindak jika terdapat kegiatan sosialisasi terbuka dan pendampingan dari pihak BPJS maupun pemerintah desa. Selain adanya peningkatan partisipasi, masih terdapat hambatan pencairan klaim yang hanya dapat dilakukan di tingkat provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, O. U, (2009) *Dimensi-dimensi Komunikasi*, Bandung: Alumni.
Effendy, O. U. (2007). *Ilmu komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Heath, R. L., & Bryant, J. (2013). *Human communication theory and research: Concepts, contexts, and challenges*. Routledge.
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat: model dan strategi pembangunan berbasis kerakyatan*. Humaniora.
- Koentjaraningrat, K. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*, edisi revisi PT. Rineka Cipta: Jakarta, 144.
- Liliweri, A. (2010). *Komunikasi serba ada serba makna*. Kencana.
- Majid, A., & Amaliah, F. R. (2023). *Strategi Pembelajaran Matematika SD/MI*. Penerbit Tahta Media.
- Muhadjir, N. (2006). *Filsafat ilmu, kualitatif dan kuantitatif untuk pengembangan ilmu dan penelitian*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyana, D., & Phd, M. A. (2022). *Ilmu komunikasi suatu pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Raco, J. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Sastropoetro, Santoso R.A., (1988), *Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Alumni Bandung.
- Silviani, I., & Darus, P. (2021). *Strategi Komunikasi Pemasaran Menggunakan Teknik Integrated Marketing Communication (IMC)*. Scopindo media pustaka.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soetrisno, L. (1995). *Menuju masyarakat partisipatif*. Penerbit Kanisius.
- Sugiyono, (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2011). *Metode Penelitian kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- _____ (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, Bandung
- Tilar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan Pendidikan*. Renika Cipta.
- Umar, H. (2001). *Strategic management in action*. Gramedia Pustaka Utama.
- Afandi, Z. (2019). Strategi Pendidikan Entrepreneurship di Pesantren Al-Mawaddah Kudus. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7(1), 55-68.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224.
- Aseandi, R. (2024). Sosialisasi Manfaat Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Mandiri Dalam Meningkatkan Keselamatan Kerja Pada Masyarakat Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1661-1665.
- Dewi, L. K. (2020). Fungsi Administrasi Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*, 5(1), 34-46.
- Dewi, L. S., Tan, F., & Nazer, M. (2021). Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang Kota Bukittinggi. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2), 213-225.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2), 133-174.

- Halawa, S. J., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Dinamika perubahan profesionalisme pegawai sebagai bentuk adaptasi sistem kerja baru di tempat usaha di Kota Gunungsitoli. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4), 1525-1534.
- Hanafri, Muhammad Iqbal; Gustomi, L.F., & Susanti, H. (2018) pengembangan iklan layanan masyarakat berbasis animasi 2d pada BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Sisfotek Global*, 8(1).
- Irawan, A. D. (2022). Pengaruh pandemi dalam menciptakan ketimpangan sosial ekonomi antara pejabat negara dan masyarakat. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 251-262.
- Judijanto, L., Damanik, F. H. S., Kusnadi, I. H., Ahmadun, A., & Leuwol, N. V. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Publik: Menilai Efektivitas Model Keterlibatan Warga. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796(online), 3(2), 1779-1787.
- Kondoj, T. H. I., Solang, J. A., Sambeka, V., Lumare, M. A., Sendow, D. C., & Tuwaidan, A. E. (2022, July). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menunjang Desa Wisata Kayuwi Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa. In *Prosiding Seminar Nasional Produk Terapan Unggulan Vokasi Politeknik Negeri Manado* (Vol. 1, No. 1, pp. 99-109). Politeknik Negeri Manado
- Laksono, S. B. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaporan Tenaga Kerja Dengan Menggunakan Sistem Manual Dan Sistem Online (Studi Kasus Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Gresik). *Jurnal Manajerial*, 5(2), 40-50.
- Maulana, A., Lathifaturahmah, L., Aulia, R., & Fitriana, A. (2023, December). Strategi Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan Asing dan Lokal Pada Industri Society 5.0: Pengembangan Pariwisata Kota Mini Lembang. In *Prosiding SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER Fakultas Ekonomi* (Vol. 2, pp. 56-63).
- Mongkau, A.A., Warouw, D. M., & Mingkid, E. (2017). Strategi Komunikasi Sales Dalam Memasarkan Mobil Bekas Di Kota Manado (Studi Pada Showroom Mobil Bekas Di Wilayah Kecamatan Malalayang Kota). *e-journal Acta Diurnal Komunikasi*, 6(2).
- Mubasyaroh, M. (2017). Strategi Dakwah Persuasif dalam Mengubah Perilaku Masyarakat. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(2), 311-324.
- Mustanir, A., Sellang, K., & Ali, A. (2018). Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Clean Government*, 2(1), 67-84
- Nurchahyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 69-78.
- Olivia, C. H. (2013). Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mengurangi Jumlah Pengguna Narkoba di Kota Samarinda. *Journal Komunikasi*, 1(1), 428-441.
- Pohan, D.D., & Fitria, U, S. (2021) jenis jenis komunikasi. *Cybernetics: journal educational Research and social studies*, 29-37
- Purba, Y. A., Aini, Y. N., Asiati, D., & Ngadi, N. (2020). Kesenjangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia: Analisis Data Sakernas 2018. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 15(2), 155-172.
- Sampurna, A., Taufiqurrohman, A., Nasution, A. F., Pulungan, N. L., Faidah, Y., & Daulay, V. D. Y. Konsep Dan Definisi Komunikasi Politik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.
- Samudera, M.F., & Pertiwi, V.I. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Jamsostek Mobile (JMO) (Studi Kasus di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rungkut Kota Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*.

- Sani, K. R. (2013). Hubungan Perencanaan Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pembangunan Di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 3(2), 74-90.
- Santosa, E. B. (2022). Strategi Digitalisasi Organisasi Pemerintah Di Tengah Pandemic COVID-19 Dengan Pendekatan Kapabilitas Dinamis: Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan.
- Sarastuti, D. (2017). Strategi komunikasi pemasaran online produk busana muslim queenova. *Visi Komunikasi*, 16(01), 71-90.
- Seta, P. M. (2014). Strategi Komunikasi PT. Kaha Event Management dalam Mempertahankan Loyalitas Pelanggan.
- Sigiro, G. H., & Afiezan, A. (2022). Analisis Sistem Dan Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua (Jht) Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(2), 305-312.
- Suprpto, T. (2011). *Pengantar ilmu komunikasi dan peran manajemen dalam komunikasi*. Caps.
- Sutrisno, H. (2020). Pengaruh bpjs ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 78-84.
- Suwandi, F. R., & Wardana, D. J. (2022). Aspek Hukum Keberlakuan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 251-262.
- Syahputri, A. Z., Della Fallenia, F., & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160-166.
- Tajuddin, Y. (2015). Walisongo dalam strategi komunikasi dakwah. *Addin*, 8(2).
- Uceng, A., Erfina, E., Mustanir, A., & Sukri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 18-32.
- Wulandari, A., & Oktavia, Y. (2022). Analisis Kebijakan Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Karyawan Di Suatu Perusahaan (Kota Batam). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(1), 47-57.
- Yunita, S., & Idrus, M. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Lamonggi Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana). *Selami Ips*, 16(1), 62-67.
- Kalianda, D., & Yohana, N. (2018). *Strategi komunikasi dinas lingkungan hidup (dlh) dalam mengimplementasikan program green city di kota teluk kuantan kabupaten kuantan singingi* (Doctoral dissertation, Riau University)
- M RIZQI, S. Y. A. H. P. U. T. R. A. (2023). STRATEGI KOMUNIKASI MUSEUM LAMPUNG DALAM MEMPUBLIKASIKAN KOLEKSI BUDAYA ADAT LAMPUNG.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (5 November 2024). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024(1)*. Diakses pada 13 Maret 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/infographic?id=1066>
- BPJS Ketenagakerjaan, (2024). Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Juni Tahun 2024. SatuDataKemnaker.go.id.diaksespada8maret2025,dari(<https://sg.docworkspace.com/d/slMsrrGcAejas74G?sa=601.1129>)
- Timex Kupang. (2022, Mei 31). Melki Laka Lena Ajak Pekerja BPU di TTS Jadi PesertaBPJSKetenagakerjaan.Diaksesdari[TimexKupang](<https://timexkupang.fajar.co>)

[id/2022/05/31/melki-laka-lena-ajak-pekerja-bpu-di-tts-jadipeserta-bpjs-ketenagakerjaan/](https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461)).

Soepost. (2024, Desember 23). BPJS NTT berikan penghargaan bagi 3 desa pedulijaminansosialketenagakerjaan.soepost<https://www.soepost.com/2024/12/bpjs-ntt-berikan-penghargaan-bagi-3.html>

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (3) Tentang Ketenagakerjaan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) UUD yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial